



RECANA KERJA (RENJA)
KECAMATAN SUMBER KABUPATEN REMBANG
TAHUN 2024

KANTOR KECAMATAN SUMBER

KATA PENGANTAR

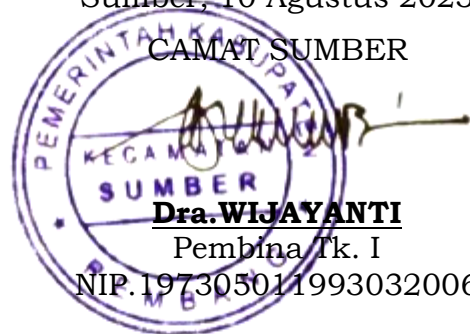
Puji syukur kita panjatkan ke hadirat Allah SWT atas semua limpahan rahmat dan karunianya yang tak terhingga, sehingga penyusunan Rencana Kerja (Renja) Kecamatan Sumber Tahun 2024 dapat terlaksana dan menghasilkan dokumen untuk acuan pelaksanaan kegiatan Kecamatan Sumber Kabupaten Rembang selama satu tahun yang akan datang. Penyusunan Rencana Kerja (Renja) Kecamatan Sumber Kabupaten Rembang, mengacu pada Dokumen Rencana Strategis Tahun 2021 – 2026.

Rencana Kerja (Renja) Kecamatan Sumber Kabupaten Rembang memberikan pedoman bagi Pimpinan dan staf di lingkungan Kecamatan Sumber Kabupaten Rembang untuk melaksanakan secara akuntabel yang berorientasi pada peningkatan kinerja untuk menjamin keberhasilan Program dan Kegiatan.

Kami sampaikan terima kasih kepada seluruh pihak yang telah memberikan dukungan, bimbingan serta partisipasi dalam penyusunan Rencana Kerja (Renja) Kecamatan Sumber Kabupaten Rembang pada umumnya dan dalam meningkatkan kinerja Kecamatan Sumber Kabupaten Rembang di masa yang akan datang pada khususnya.

Sumber, 10 Agustus 2023

CAMAT SUMBER

The image shows a circular official stamp of the Kecamatan Sumber, Kabupaten Rembang. The text around the stamp reads "PEMERINTAH KABUPATEN REMBANG" and "KECAMATAN SUMBER". Overlaid on the stamp is a handwritten signature in black ink.

Dra. WIJAYANTI

Pembina Tk. I

NIP.197305011993032006

DAFTAR ISI

	Hal.
Kata Pengantar	1
Daftar Isi	2
BAB I PENDAHULUAN	3
1.1 Latar Belakang	3
1.2 Landasan Hukum	6
1.3 Maksud dan Tujuan	8
1.4 Sistematika Penulisan	9
BAB II HASIL EVALUASI PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU	10
2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu dan Capaian Renstra Perangkat Daerah	10
2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah	17
2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	24
2.4 Review Terhadap Rancangan Awal RKPD	28
2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat	33
BAB III TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH	35
3.1 Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional	35
3.2 Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah	35
3.3 Program dan Kegiatan	38
BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH	39
BAB V PENUTUP	51

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Rencana Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut dengan Renja Perangkat Daerah sebagaimana tercantum dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah adalah dokumen Perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun dan berfungsi untuk menerjemahkan perencanaan strategis lima tahunan yang dituangkan dalam Renstra PD ke dalam perencanaan tahunan yang sifatnya lebih operasional.

Sebagai dokumen resmi Perangkat Daerah, Rencana Kerja mempunyai kedudukan yang strategis yaitu menjembatani antara perencanaan pada Perangkat Daerah dengan Rencana Kerja Perangkat Daerah (RKPD), sebagai implementasi perencanaan strategis Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dan Renstra Perangkat Daerah yang menjadi satu kesatuan untuk mendukung pencapaian visi dan misi Daerah. Renja Kantor Kecamatan Sumber Tahun 2024 disusun secara terpadu, partisipatif dan demokratis. Renja Kecamatan Sumber Kabupaten Rembang tahun 2024 digunakan sebagai dasar penyusunan Rencana Kerja Kecamatan Sumber Kabupaten Rembang. Rencana Kerja Anggaran Rancangan Awal (RKA) tahun 2024 untuk penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten dan sebagai dasar pengusulan program/ kegiatan/sub kegiatan yang akan dibiayai APBD Propinsi.

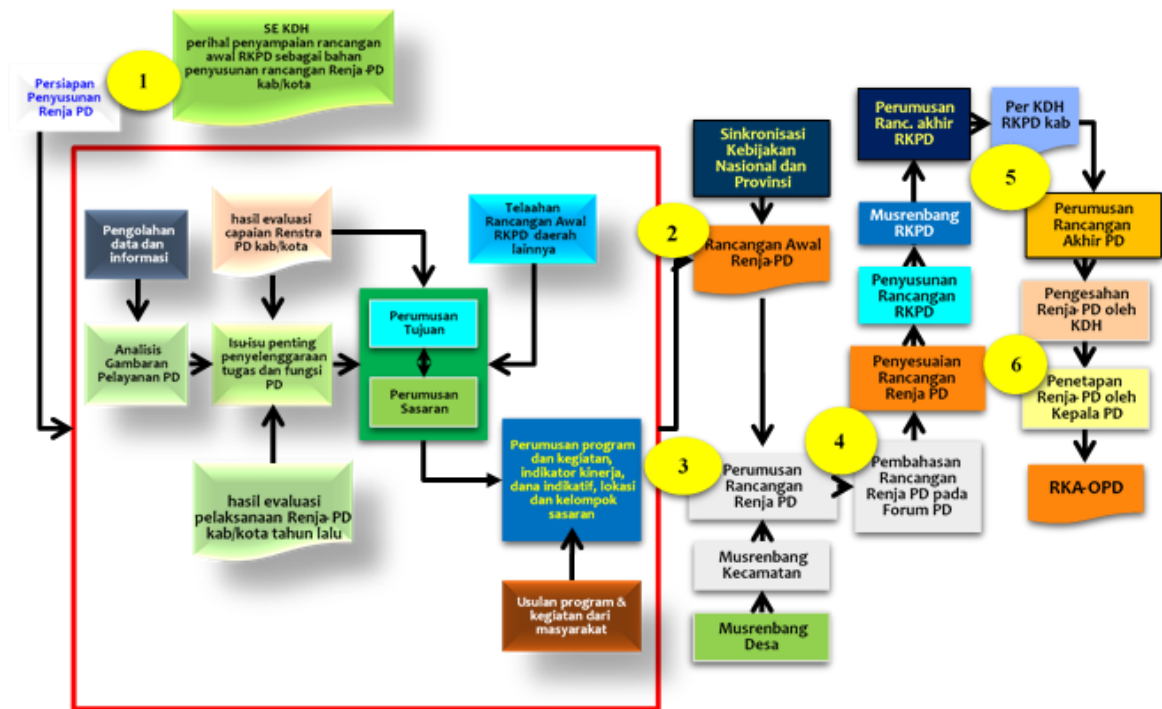
Dokumen Renja pada dasarnya merupakan suatu proses pemikiran strategis untuk menyikapi isu – isu yang berkembang dan mengimplementasikannya dalam program, kegiatan, dan sub

kegiatan yang akan dilaksanakan, sehingga penyusunan Renja sangat ditentukan oleh kemampuan Perangkat Daerah dalam menyusun, mengorganisasikan, mengimplementasikan mengendalikan dan mengevaluasi capaian program dan kegiatan sesuai tugas pokok dan fungsi Perangkat Daerah.

Dalam Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah disebutkan keterkaitan antara Rencana Kerja dengan dokumen perencanaan lainnya, dimana dalam Pasal 273 ayat (2) disebutkan “Rencana Strategis Perangkat Daerah dirumuskan ke dalam rancangan Rencana Kerja Perangkat Daerah dan digunakan sebagai bahan penyusunan rancangan RKPD.” Renja Perangkat Daerah ini nantinya akan menjadi dasar dalam penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) sebelum ditetapkan menjadi Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA).

Dalam prosesnya, penyusunan Renja Perangkat Daerah mengacu pada kerangka arahan yang dirumuskan dalam RKPD. Oleh karena itu penyusunan Rencana Kerja Perangkat Daerah dikerjakan secara simultan/paralel dengan penyusunan Renja Perangkat Daerah, dengan fokus melakukan pengkajian terlebih dahulu terhadap kondisi Perangkat Daerah, evaluasi pelaksanaan Renja Perangkat Daerah tahun 2022 dan evaluasi terhadap pencapaian kinerja pada Renja Kecamatan Sumber Kabupaten Rembang Tahun 2022. Tahap penetapan Rencana Kerja Perangkat Daerah dilakukan sebagai pedoman dengan pengesahan oleh Kepala Daerah, selanjutnya Renja Perangkat Daerah dijadikan pedoman bagi Perangkat Daerah dalam menyusun program, kegiatan dan sub kegiatan prioritas Perangkat Daerah pada tahun anggaran berkenaan.

Sumber : Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 (diolah).

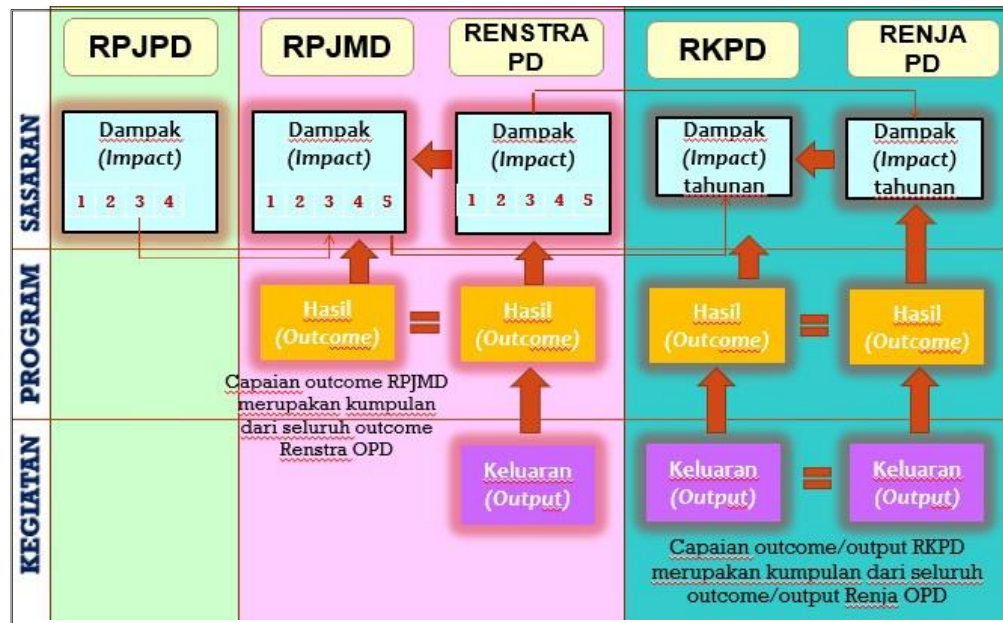


Gambar 1.1

Tahapan Proses Penyusunan Renja Perangkat Daerah

Penyusunan Renja dengan tahapan Rancangan Awal, Rancangan Akhir dan Rencana Kerja yang ditetapkan dengan Peraturan Kepala Daerah sebagai suatu dokumen perencanaan pembangunan daerah tentunya tidak lepas dari Rencana Strategis Perangkat Daerah, Rencana Kerja Perangkat Daerah (RKPD), Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD). Keterkaitan antar Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah tersebut dijelaskan sebagaimana gambar 1.1 Berdasarkan gambar tersebut dapat kita simpulkan bahwa Renja sebagai dokumen perencanaan tahunan mengacu serta bersumber dari Renstra serta RKPD, sehingga arah perencanaan pembangunan perangkat daerah selaras dengan pembangunan di daerah.

Penyusunan Rancangan Awal Rencana Kerja (Renja) Kecamatan Sumber Kabupaten Rembang Tahun 2024 secara eksplisit merupakan penjabaran terhadap rencana pelaksanaan program, kegiatan dan Sub Kegiatan Kecamatan Sumber pada tahun+1 yaitu tahun 2025 dalam rangka memenuhi tugas dan fungsi Kecamatan sebagai pelaksana urusan pemerintahan.



Sumber : Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 (diolah).

Gambar 1.2

Keterkaitan Antara Renja dengan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah

1.2 Landasan Hukum

Landasan hukum yang menjadi dasar dalam penyusunan Rencana Kerja Kantor Kecamatan Sumber Kabupaten Rembang adalah sebagai berikut :

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Undang- Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;

3. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Laporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2008 tentang tahapan Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2021 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2022;
7. Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Nomor 1 Tahun 2005 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Rembang Tahun 2005 - 2025;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Rembang;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Nomor 1 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Rembang Tahun 2010 - 2025;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Nomor 2 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Rembang Tahun 2021 - 2026;
11. Peraturan Bupati Rembang Nomor 79 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Kecamatan;
12. Peraturan Bupati Rembang Nomor 24 tahun 2022 tentang Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2023.

1.3 Maksud dan Tujuan

1.3.1 Maksud

Penyusunan Rancangan Awal Renja Kantor Kecamatan Sumber Kabupaten Rembang tahun 2024 dimaksudkan untuk merumuskan program dan kegiatan pembangunan yang sesuai dengan tugas dan fungsi Kecamatan Sumber Kabupaten Rembang selama satu tahun. Rumusan yang disusun adalah wujud dari perencanaan pembangunan yang akuntabel, partisipatif, bermanfaat, tepat sasaran dan berkesinambungan dan diharapkan berkontribusi dalam mendukung pencapaian visi, misi dan tujuan pembangunan Kabupaten Rembang yang memuat program, kegiatan, lokasi, dan kelompok sasaran disertai indikator kinerja dan pendanaannya.

1.3.2 Tujuan

Penyusunan Rancangan Awal Renja Kantor Kecamatan Sumber Kabupaten Rembang tahun 2024 bertujuan :

1. Mengevaluasi pelaksanaan Program/Kegiatan Tahun 2022 sebagai bahan penyusunan Renja Kantor Kecamatan Sumber Kabupaten Rembang Tahun 2024;
2. Merumuskan program dan kegiatan pembangunan yang sesuai dengan tugas dan fungsi Kantor Kecamatan Sumber Kabupaten Rembang Tahun 2024 dan program/kegiatan yang ada di Rencana Kerja (Renja) kedalam Kebijakan Umum Anggaran Prioritas dan Plafon Anggaran (KUA -PPAS) Tahun 2024;
3. Mengetahui isu-isu penting dalam penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Kantor Kecamatan Sumber Kabupaten Rembang beserta peluang dan tantangan yang dihadapi;
4. Menyediakan informasi yang dapat digunakan untuk memperbaiki kualitas keputusan pimpinan.

1.4. Sistematika Penulisan

Rancangan Awal Rencana Kerja Perangkat Daerah Kecamatan Sumber Kabupaten Rembang Tahun 2024 dengan sistematika sebagai berikut :

BAB I	PENDAHULUAN
	1.1. Latar Belakang
	1.2. Landasan Hukum
	1.3. Maksud dan Tujuan
	1.4. Sistematika Penulisan
BAB II	HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU
	2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu dan Pencapaian Renstra Perangkat Daerah
	2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah
	2.3. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah
	2.4. Review Terhadap Rancangan Awal RKPD
	2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat
BAB III	TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH
	3.1. Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional
	3.2. Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah
	3.3. Program dan Kegiatan
BAB IV	4.1. RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH
BAB V	PENUTUP
	Lampiran - lampiran

BAB II

HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2022

2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun lalu dan Capaian Renstra Perangkat Daerah

Evaluasi pelaksanaan Renja tahun lalu ditujukan untuk mengidentifikasi sejauh mana kemampuan perangkat daerah dalam melaksanakan program dan kegiatan, mengidentifikasi realisasi pencapaian target kinerja program dan kegiatan Renstra perangkat daerah serta permasalahan dan hambatan yang dihadapi. Evaluasi Rencana Kerja Kecamatan Sumber Kabupaten Rembang tahun lalu pada dasarnya menyajikan pengukuran terhadap hasil kinerja program/kegiatan yang telah dilaksanakan oleh Kecamatan Sumber Kabupaten Rembang selama kurun waktu tahun 2022. Untuk mengukur kinerja diperlukan penetapan seperangkat indikator kinerja yang merupakan alat untuk mengukur pencapaian suatu kebijakan/program/kegiatan dan sekaligus merupakan indikator untuk mengevaluasi dan menilai kinerja sebuah instansi.

Berdasarkan Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 indikator kinerja merupakan ukuran kuantitatif dan kualitatif yang secara spesifik digunakan untuk menggambarkan tingkat pencapaian suatu kegiatan yang telah ditetapkan. Penetapan indikator-indikator kinerja ini harus didasarkan pada perkiraan yang realistis dengan memperhatikan tujuan dan sasaran yang ditetapkan, serta data pendukung yang terorganisasi, sehingga keberhasilan pencapaiannya dapat mengindikasikan sejauh mana keberhasilan pencapaian sasaran pada tahun yang bersangkutan.

Pengukuran kinerja Kecamatan Sumber Kabupaten Rembang Tahun 2022 dengan sasaran dan capaian sebagaimana **Tabel 2.1** berikut :

Tabel 2.1.

Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah dan
Pencapaian Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2022
Kabupaten Rembang

Kode					Urusan /Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program /Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/Kegiatan (output)/Sub Kegiatan	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) tahun 2022	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d tahun 2021	Target dan Realisasi Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Tahun 2022			Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah Tahun 2023	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra PD s/d tahun berjalan	
									Target Renja Perangkat daerah Tahun 2022	Realisasi Renja Perangkat daerah Tahun 2022	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan tahun 2023	Tingkat capaian Realisasi Target Renstra (%)
1					2	3	4	5	6	7	8= (7/6)*100	9	10	11=(10/4)
7					Kecamatan Sumber									
7	01				Urusan Kesekretariatan									
7	01	1			Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Nilai SAKIP OPD	65	64.62	65	65,18	100,27	65	65,18	100,27
7	01	01	2.01		Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat	Persentase Keselarasan Perencanaan Terhadap capaian	70	98	98	98	100	98	98	100

					Daerah	Kinerja Perangkat Daerah								
7	01	01	2.01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Doikumen Perencanaan Perangkat Daerah	1	1	1	1	100	1	1	100
7	01	01	2.01	07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	2	2	2	2	100	2	2	100
7	01	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase dokumen pelaporan keuangan dengan kualitas baik	80	80	80	80	100	80	80	100
7	01	01	2.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah orang yang menerima Gaji dan Tunjangan ASSN	22	22	22	22	100	22	22	100
7	01	01	2.02	03	Pelaksanaan Penatausahaan dan pengujian / verifikasi keunagan SKPD	Jumlah Dokumen Pentaausahaan dan pengujian/verifikasi SKPD	12	12	12	12	100	12	12	100
7	01	01	2.02	05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan akhir tahun SKPD	Jumlah Laporan keuangan Khir Tahun SKPD dan laporan hasil koordinasi penyusunan laporan keuangan akhir tahun SKPD	1	1	1	1	100	1	1	100
7	01	01	2.02	05	Monitoring, Evaluasi dan Penilaian kinerja pegawai	Jumlah dokumen monitoring, evaluasi dan penilaian kinerja pegawai	21	21	21	21	100	21	21	100
7	01	01	2.05	05	Adminitrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Dokumen kepegawaian yang dikelola dengan baik	95	95	95	95	100	95	95	100
7	01	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase pemenuhan pelayanan Umum	100	100	100	100	100	100	100	100
7	01	01	2.06	01	Penyediaan Komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Jumlah paket komponenen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yg disediakan	12	12	12	12	100	12	12	100
7	01	01	2.06	03	Penyediaan peralatan rumah tangga	Jumlah paket peralatan rumah tangga yang disediakan	12	12	12	12	100	12	12	100

7	01	01	2.06	04	Penyediaan bahan logistik kantor	Jumlah paket nbahan logostik kantor yang disediakan	12	12	12	12	100	12	12	100
7	01	01	2.06	05	Penyediaan cetakan dan penggandaan	Jumlah paket barang cetakan dan penggandaan yang disediakan	12	12	12	12	100	12	12	100
7	01	01	2.06	06	Pernyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Jumlah dokumen bahan nbacaan dan peraturan perundang-undangan yang disediakan	12	12	12	12	100	12	12	100
7	01	01	2.06	07	Penyediaan bahan/material	Jumlah paket/bahan material yang disediakan	12	12	12	12	100	12	12	100
7	01	01	2.06	09	Penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	Jumlah laporan penyelenggaraan koordinasi dan konsultasi SKPD	12	12	12	12	100	12	12	100
7	01	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Ketercakupan sarana dan prasarana aparatur	95	85	95	85	89,47	95	85	89,47
7	01	01	2.07	11	Pengadaan Sarana dan prasarana pendukunggedungnkantor atau bangunan lainnya	Jumlah paket pengadaan saran dfan prasarana kantor atau bangunan lainnya yg disediakan	1	1	1	1	85	1	1	85
7	01	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase pemenuhan pelayanan administrasi perkantoran	100	100	100	100	100	100	100	100
7	01	01	2.08	01	Penyediaan jasa surat menyurat	Jumlah Laporan penyediaan jasa surat menyurat	12	12	12	12	100	12	12	100
7	01	01	2.08	02	Penyediaan jasa komunikasi, Sumber daaya air dan listrik	Jumlah laporan Penyediaan jasa komunikasi, Sumber daaya air dan listrik yang disediakan	12	12	12	12	100	12	12	100
7	01	01	2.08	03	Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor	Jumlah Laporan Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan	12	12	12	12	100	12	12	100
7	01	01	2.08	04	Penyediaan jasa pelayanan umum kantor	Jumlah laporan jasa pelayanan umum kantor yang disediakan	12	12	12	12	100	12	12	100

7	01	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase BMD dengan kondisi baik	80	80	80	80	100	80	80	100
7	01	01	2.09	01	Penyediaan Jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan dan pajak kendaraan perorangan dinas atau kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah kendaraan perorangan Dinas atau kendaraan Dinas Jabatan yg dipelihara dan dibayarkan pajaknya	12	12	12	12	100	12	12	100
7	01	01	2.09	09	Pemeliharaan/rehabilitasi gedung kantor dan bangunan lainnya	Jumlah gedung kantor dan bangunan lainnya yg dipelihara / direhabilitasi	3	3	3	3	100	3	3	100
7	01	01	2.09	11	Pemeliharaan/rehabilitasi sarana dan prasarana pendukung gedung kantor atau bangunan lainnya	Jumlah sarana dan prasarana pendukung gedung kantor atau bangunan lainnya yg dipelihara/direhabilitasi	20	20	20	20	100	20	20	100
7	01	02			Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Capaian urusan pemerintahan yang dilimpahkan ke Camat	75	75	75	75	100	75	75	100
7	01	02	2.02		Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak dilaksanakan oleh unit kerja perangkat daerahnya ada di Kecamatan	Persentase Penyelenggaraan kegiatan Pemerintahan di tingkat Kecamatan	100	100	100	100	100	100	100	100
7	01	02	2.02	03	Peningkatan efektivitas pelaksanaan pelayanan kpd masyarakat diwilayah Kec.	Jumlah laporan Peningkatan efektivitas pelaksanaan pelayanan kpd masyarakat diwilayah Kec.	4	4	4	4	100	4	4	100
7	01	02	2.04		Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yg dilimpahkan kpd Camat	Persentase pemerintah desa yg lunas bayar PBB	100	100	100	100	100	100	100	100
7	01	02	2.04	03	Pelaksanaan urusan pemerintahan yg terkait dengan kewenangan lain yg dilimpahkan	Jumlah laporan pelaksanaan kewenangan lain yg dilimpahkan	3	3	3	3	100	3	3	100

7	01	03			Program Pemberdayaan Masyarakat Desa/Kelurahan	Persentase kontribusi dana desa/kelurahan utk pemberdayaan masyarakat	20	20	20	20	100	20	20	100
7	01	03	2.01		Koordinasi kegiatan Pemberdayaan Desa	Persentase penyelenggaraan penunjang kesejahteraan masyarakat yg ditangani	100	100	100	100	100	100	100	100
7	01	03	2.01	01	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan yang ada di Desa	Jumlah lembaga kemasyarakatan yg berpartisipasi dalam forum musyawarah perencanaan pembangunan di desa	4	4	4	4	100	4	4	100
7	01	03	2.01	03	Peningkatan efektifitas kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah laporan Peningkatan efektifitas kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	1	1	1	1	100	1	1	100
7	01	04			Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum	Cakupan Penyelenggaraan urusan ketentraman dan ketertiban umum	100	100	100	100	100	100	100	100
7	01	04	2.01		Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum	% Penyelesaian Permasalahan Ketentraman dan ketertiban umum	100	100	100	100	100	100	100	100
7	01	04	2.01	01	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, TNI dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Jumlah laporan hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, TNI dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	6	6	6	6	100	6	6	100
7	01	04	2.02		Koordinasi Penerapan dan penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	Persentase penyelesaian permasalahan ketentraman dan ketertiban umum	100	100	100	100	100	100	100	100
7	01	04	2.02	01	Koordinasi/sinergi dgn perangkat daerahnya tugas fungsinya di bidang penegakan peraturan perundang-undangan dan/atau Kepolisian	Jumlah laporan Koordinasi/sinergi dgn perangkat daerahnya tugas fungsinya di bidang penegakan peraturan perundang-undangan dan/atau Kepolisian negara Republik	1	1	1	1	100	1	1	100

					negara Republik Indonesia	Indonesia								
7	01	05			Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	Cakupan penyelenggaraan urusan pemerintahann umum	100	100	100	100	100	100	100	100
7	01	05	2.01		Penyelenggaraan urusan pemerintahan umum sesuai penugasan Kepala Daaerah	Jumlah Fasilitas pembinaan wawasan kebangsaan	1	1	1	1	100	1	1	100
7	01	05	2.01	01	Pembinaan wawasan kebangsaan dan ketahanan nasional dalam rangka memantapkan pengamalan Pancasila, pelaksanaan UUD Negara Republik Indonesia 1945, Pelestarian Bhineka Tunggal Ika serta pemertahanan dan Pemeliharaan keutuhan NKRI	Jumlah orang yang mengikuti Pembinaan wawasan kebangsaan dan ketahanan nasional dalam rangka memantapkan pengamalan Pancasila, pelaksanaan UUD Negara Republik Indonesia 1945, Pelestarian Bhineka Tunggal Ika serta pemertahanan dan Pemeliharaan keutuhan NKRI	100	100	100	100	100	100	100	100
7	01	06			Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Persentase desa dengan tata kelola pemerintahan yg baik	100	100	100	100	100	100	100	100
7	01	06	2.01		Fasilitasi, rekomendasi dan koordinasi pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa	Rata-rata IKM Desa	64	64	64	65,6	102,5	64	65,6	102,5
					Fasilitasi, Administrasi Tata Pemerintahan Desa	Jumlah dokumen yg difasilitasi dlm rangka administrasin tata pemerintahan desa	1	1	1	1	100	1	1	100
					Fasilitasi pelaksanaan tugas Kepala Desa dan Perangkat desa	Jumlah dokumen Fasilitasi pelaksanaan tugas Kepala Desa dan Perangkat desa	1	1	1	1	100	1	1	100
7	01	06	2.01	06	Fasilitasai Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa	Jumlah dokumen Fasilitasai Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa	2	2	2	2	100	2	2	100

2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Penyelenggaraan pelayanan Kecamatan adalah melaksanakan fungsi sebagai Lembaga Pelayanan Publik yang melaksanakan tugas pokok dan fungsinya berdasarkan Peraturan Bupati Rembang **Nomor 79 Tahun 2021** tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Kecamatan

Kecamatan Sumber Kabupaten Rembang sebagaimana dalam Peraturan Bupati Rembang **Nomor 6 Tahun 2021** tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Kecamatan mempunyai tugas membantu Bupati dalam melaksanakan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan dalam urusan pemerintahan, pelayanan publik dan pemberdayaan masyarakat desa.

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Rembang **Nomor 2 Tahun 2021** Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Rembang **Tahun 2021-2026**, indikator kinerja pelayanan Kantor Kecamatan Sumber Kabupaten Rembang sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya adalah sebagai berikut:

1. Penyelenggaraan urusan Pemerintahan Umum;
2. Pengkoordinasian kegiatan pemberdayaan masyarakat;
3. Pengkoordinasian upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum;
4. Pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan kegiatan desa atau kelurahan;
5. Pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan kabupaten yang tidak dilaksanakan oleh unit kerja pemerintah daerah yang ada di kecamatan;

Dalam melakukan analisis terhadap kinerja pelayanan Kecamatan mengacu pada indikator-indikator yang tercantum pada Renstra Kecamatan Sumber Kabupaten Rembang Tahun 2021-2026. Analisis ini salah satunya dilakukan terhadap target dan capaian indikator kinerja pelayanan.

Kecamatan Sumber Kabupaten Rembang sesuai dengan tugas dan fungsinya berupaya mewujudkan kinerja pelayanan perangkat daerah dengan indikator kinerja yang telah ditetapkan dalam RPJMD Kabupaten Rembang tahun 2021-2026. Pencapaian kinerja Kecamatan Sumber Kabupaten Rembang dirumuskan dan dikaji berdasarkan format tabel T-C.30 Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017.

Tabel 2.2.
Realisasi Kinerja dan Keuangan Perangkat Daerah Kecamatan Sumber Kabupaten Rembang
Tahun 2022

Kode					Urusan /Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program /Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (<i>outcomes</i>)/Kegiatan (<i>output</i>)/Sub Kegiatan	Target dan Realisasi Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Tahun 2022			Anggaran dan Realisasi Keuangan Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Tahun 2022		
							Target Kinerja Tahun 2022	Realisasi Kinerja Tahun 2022	Capaian Realisasi Kinerja (%)	Anggaran Tahun 2022	Realisasi Tahun 2022	Capaian Realisasi Keuangan (%)
1					2	4	5	6	7= (6/5)*100	8	9	10= (9/8)*100
7					Kecamatan Sumber							
7	01				Urusan Kesekretariatan							
7	01	1			Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Nilai SAKIP OPD	65	65,18	100,27	-	-	-
7	01	01	2.01		Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Keselarasan Perencanaan Terhadap capaian Kinerja Perangkat Daerah	98	98	100	-	-	-
7	01	01	2.01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	1	1	100	5.150.000	5.149.810	99,99
7	01	01	2.01	07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	2	2	100	18.150.000	18.149.500	99,99
7	01	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase dokumen pelaporan keuangan dengan kualitas baik	80	80	100	-	-	-
7	01	01	2.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah orang yang menerima Gaji dan Tunjangan ASSN	22	22	100	1.913.862.000	1.879.867.111	98,22
7	01	01	2.02	03	Pelaksanaan Penatausahaan dan pengujian / verifikasi keunagan SKPD	Jumlah Dokumen Pentausahaan dan pengujian/verifikasi SKPD	12	12	100	60.000.000	59.999.700	99,99
7	01	01	2.02	05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan akhir tahun SKPD	Jumlah Laporan keuangan Khir Tahun SKPD dan laporan hasil koordinasi penyusunan laporan keuangan akhir	1	1	100	5.500.000	5.498.750	99,98

						tahun SKPD							
7	01	01	2.02	05	Monitoring, Evaluasi dan Penilaian kinerja pegawai	Jumlah dokumen monitoring, evaluasi dan penilaian kinerja pegawai	21	21	100	-	-	-	
7	01	01	2.05	05	Adminitrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Dokumen kepegawaian yang dikelola dengan baik	95	95	100	5.000.000	4.999.830	99,99	
7	01	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase pemenuhan pelayanan Umum	100	100	100	-	-	-	
7	01	01	2.06	01	Penyediaan Komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Jumlah paket komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yg disediakan	12	12	100	6.000.000	5.994.968	99,92	
7	01	01	2.06	03	Penyediaan peralatan rumah tangga	Jumlah paket peralatan rumah tangga yang disediakan	12	12	100	6.500.000	6.498.325	99,97	
7	01	01	2.06	04	Penyediaan bahan logistik kantor	Jumlah paket nbahan logostik kantor yang disediakan	12	12	100	43.500.000	43.498.000	99,99	
7	01	01	2.06	05	Penyediaan cetakan dan penggandaan	Jumlah paket barang cetakan dan penggandaan yang disediakan	12	12	100	7.513.430	7.513.400	99,99	
7	01	01	2.06	06	Pernyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Jumlah dokumen bahan nbacaan dan peraturan perundang-undangan yang disediakan	12	12	100	3.600.000	3.600.000	100	
7	01	01	2.06	07	Penyediaan bahan/material	Jumlah paket/bahan material yang disediakan	12	12	100	20.574.957	20.574.100	99,99	
7	01	01	2.06	09	Penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	Jumlah laporan penyelenggaraan koordinasi dan konsultasi SKPD	12	12	100	10.720.000	10.520.000	98,13	
7	01	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Ketercakupan sarana dan prasarana aparatur	95	85	89,47	-	-	-	
7	01	01	2.07	11	Pengadaan Sarana dan prasarana pendukunggedungnkantor atau bangunan lainnya	Jumlah paket pengadaan saran dfan prasarana kantor atau bangunan lainnya yg disediakan	1	1	85	15.000.000	14.999.868	99,99	
7	01	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase pemenuhan pelayanan administrasi perkantoran	100	100	100	-	-	-	
7	01	01	2.08	01	Penyediaan jasa surat menyurat	Jumlah Laporan penyediaan jasa surat menyurat	12	12	100	1.000.000	1.000.000	100	
7	01	01	2.08	02	Penyediaan jasa komunikasi, Sumber daaya air dan listrik	Jumlah laporan Penyediaan jasa komunikasi, Sumber daaya air dan listrik yang disediakan	12	12	100	18.000.000	8.400.922	46,67	
7	01	01	2.08	03	Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor	Jumlah Laporan Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan	12	12	100	3.956.570	3.956.570	100	

7	01	01	2.08	04	Penyediaan jasa pelayanan umum kantor	Jumlah laporan jasa pelayanan umum kantor yang disediakan	12	12	100	47.970.000	47.970.000	100
7	01	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase BMD dengan kondisi baik	80	80	100	-	-	-
7	01	01	2.09	01	Penyediaan Jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan dan pajak kendaraan perorangan dinas atau kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah kendaraan perorangan Dinas atau kendaraan Dinas Jabatan yg dipelihara dan dibayarkan pajaknya	12	12	100	13.994.368	13.620.424	97,33
7	01	01	2.09	09	Pemeliharaan/rehabilitasi gedung kantor dan bangunan lainnya	Jumlah gedung kantor dan bangunan lainnya yg dipelihara / direhabilitasi	3	3	100	20.000.000	19.994.339	99,97
7	01	01	2.09	11	Pemeliharaan/rehabilitasi sarana dan prasarana pendukung gedung kantor atau bangunan lainnya	Jumlah sarana dan prasarana pendukung gedung kantor atau bangunan lainnya yg dipelihara/direhabilitasi	20	20	100	8.352.100	8.328.500	99,72
7	01	02			Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Capaian urusan pemerintahan yang dilimpahkan ke Camat	75	75	100	-	-	-
7	01	02	2.02		Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak dilaksanakan oleh unit kerja perangkat daerahnyg ada di Kecamatan	Persentase Penyelenggaraan kegiatan Pemerintahan di tingkat Kecamatan	100	100	100	-	-	-
7	01	02	2.02	03	Peningkatan efektivitas pelaksanaan pelayanan kpd masyarakat diwilayah Kec.	Jumlah laporan Peningkatan efektivitas pelaksanaan pelayanan kpd masyarakat diwilayah Kec.	4	4	100	12.530.000	12.529.650	99,99
7	01	02	2.04		Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yg dilimpahkan kpd Camat	Persentase pemerintah desa ygn lunas bayar PBB	100	100	100	-	-	-
7	01	02	2.04	03	Pelaksanaan urusan pemerintahan yg terkait dengan kewenangan lain yg dilimpahkan	Jumlah laporan pelaksanaan kewenangan lain yg dilimpahkan	3	3	100	54.600.000	54.599.100	99,99
7	01	03			Program Pemberdayaan Masyarakat Desa/Kelurahan	Persentase kontribusi dana desa/kelurahan utk pemberdayaan masyarakat	20	20	100	-	-	-
7	01	03	2.01		Koordinasi kegiatan Pemberdayaan Desa	Persentase penyelenggaraan penunjang kesejahteraan masyarakat yg ditangani	100	100	100	-	-	-
7	01	03	2.01	01	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan yang ada di Desa	Jumlah lembaga kemasyarakatan yg berpartisipasi dalam forum musyawarah perencanaan pembangunan di desa	4	4	100	31.749.950	31.749.900	99,99
7	01	03	2.01	03	Peningkatan efektifitas kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah	Jumlah laporan Peningkatan efektifitas kegiatan	1	1	100	24.724.790	23.224.580	93,93

					Kecamatan	Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan							
7	01	04			Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum	Cakupan Penyelenggaraan urusan ketentraman dan ketertiban umum	100	100	100	-	-	-	
7	01	04	2.01		Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum	% Penyelesaian Permasalahan Ketentraman dan ketertiban umum	100	100	100	-	-	-	
7	01	04	2.01	01	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, TNI dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Jumlah laporan hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, TNI dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	6	6	100	-	-	-	
7	01	04	2.02		Koordinasi Penerapan dan penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	Persentase penyelesaian permasalahan ketentraman dan ketertiban umum	100	100	100	-	-	-	
7	01	04	2.02	01	Koordinasi/sinergi dgn perangkat daerahnya tugas fungsinya di bidang penegakan peraturan perundang-undangan dan/atau Kepolisian negara Republik Indonesia	Jumlah laporan Koordinasi/sinergi dgn perangkat daerahnya tugas fungsinya di bidang penegakan peraturan perundang-undangan dan/atau Kepolisian negara Republik Indonesia	1	1	100	47.899.790	47.899.580	99,99	
7	01	05			Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	Cakupan penyelenggaraan urusan pemerintahannya umum	100	100	100	-	-	-	
7	01	05	2.01		Penyelenggaraan urusan pemerintahan umum sesuai penugasan Kepala Daerah	Jumlah Fasilitas pembinaan wawasan kebangsaan	1	1	100	-	-	-	
7	01	05	2.01	01	Pembinaan wawasan kebangsaan dan ketahanan nasional dalam rangka memantapkan pengamalan Pancasila, pelaksanaan UUD Negara Republik Indonesia 1945, Pelestarian Bhineka Tunggal Ika serta pemertahanan dan Pemeliharaan keutuhan NKRI	Jumlah orang yang mengikuti Pembinaan wawasan kebangsaan dan ketahanan nasional dalam rangka memantapkan pengamalan Pancasila, pelaksanaan UUD Negara Republik Indonesia 1945, Pelestarian Bhineka Tunggal Ika serta pemertahanan dan Pemeliharaan keutuhan NKRI	100	100	100	10.000.000	9.999.830	99,99	
7	01	06			Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Persentase desa dengan tata kelola pemerintahan yg baik	100	100	100	-	-	-	
7	01	06	2.01		Fasilitasi, rekomendasi dan koordinasi pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa	Rata-rata IKM Desa	64	65,6	102,5	-	-	-	
					Fasilitasi, Administrasi Tata Pemerintahan Desa	Jumlah dokumen yg difasilitasi dlm rangka administrasi tata pemerintahan desa	1	1	100	-	-	-	

					Fasilitasi pelaksanaan tugas Kepala Desa dan Perangkat desa	Jumlah dokumen Fasilitasi pelaksanaan tugas Kepala Desa dan Perangkat desa	1	1	100	-	-	-
7	01	06	2.01	06	Fasilitasai Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa	Jumlah dokumen Fasilitasai Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa	2	2	100	22.650.000	22.650.000	100

2.3. Isu – Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah

Kecamatan Sumber Kabupaten Rembang yang mempunyai tugas dan fungsi sebagai unsur pelayanan, maka program dan kegiatan pelayanan dan fasilitasi merupakan salah satu unsur pokok yang dilaksanakan oleh Kecamatan Sumber Kabupaten Rembang maka hal tersebut akan memunculkan isu-isu penting yang harus diakomodir maupun ditindaklanjuti karena berpengaruh terhadap pelayanan di Kecamatan Sumber. Berikut uraian isu-isu penting sebagaimana dimaksud:

A. Sejauh mana tingkat kinerja pelayanan

Tingkat kinerja Kecamatan Sumber Kabupaten Rembang dapat dilihat berdasarkan capaian indikator urusan yang menjadi sasaran strategis dan program sebagaimana pada tabel 2.1. secara umum kinerja Kecamatan Sumber tergolong baik dikarenakan mampu memenuhi target capaian indikator yang telah ditetapkan.

B. Permasalahan dan hambatan yang dihadapi dalam menyelenggarakan tugas dan fungsi Pelayanan;

Beberapa kendala dan permasalahan yang dihadapi Kantor Kecamatan Sumber Kabupaten Rembang dalam peningkatan kualitas pelayanan publik adalah sebagai berikut :

1. Rendahnya Kualitas Pelayanan Publik
2. Rendahnya Kualitas Penyelenggaraan Pemerintahan Desa

C. Dampaknya terhadap pencapaian visi dan misi kepala daerah, terhadap capaian program nasional/internasional

Dampak yang dapat muncul sebagai akibat dari permasalahan diatas diantaranya adalah sebagai berikut :

1. Belum optimalnya kualitas Pelayanan Publik ;
2. Rendahnya pemahaman dan pengetahuan terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi sebagai aparatur Kecamatan.

D. Tantangan dan peluang dalam meningkatkan pelayanan Perangkat Daerah

Dalam rangka meningkatkan pengembangan pelayanan pada Kecamatan Sumber Kabupaten Rembang, diperlukan suatu analisa faktor faktor yang dapat mendukung dan mempengaruhi keberhasilan serta kegagalan strategi kebijakan, baik analisa tantangan maupun peluang yang dihadapi Kecamatan Sumber Kabupaten Rembang, antara lain :

1. Tantangan

1. Tingginya tuntutan masyarakat terhadap aparaturnya pemerintah dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat;
2. Terwujudnya reformasi birokrasi di jajaran pemerintah di semua tingkatan;
3. Transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan program dan kegiatan

2. Peluang

1. Banyaknya tugas pokok dan fungsi yang harus dilaksanakan berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa dan Undang Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah, serta pelimpahan Kewenangan dari pemerintah dan pemerintah Daerah/Bupati yang didelegasikan kepada Camat;
2. Pemberian otonomi yang luas disertai dukungan pendanaan dari APBN/APBD kepada pemerintah desa untuk menyelenggarakan fungsi pemerintahan, pelayanan umum, pembangunan, pemberdayaan masyarakat, kesejahteraan masyarakat dan perlindungan sosial;
3. Dukungan pendanaan dari pemerintah daerah untuk menunjang pelaksanaan tugas pokok dan fungsi kecamatan.

E. Isu Strategis

Pada Dokumen RPJMD Kabupaten Rembang tahun 2021-2026 terdapat 7 (tujuh) isu strategis yaitu (1) Perlunya Penguatan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan, (2) Kualitas Sumber Daya Manusia yang belum memiliki daya saing yang optimal serta pelayanan dasar yang masih memerlukan peningkatan, (3) Belum optimalnya pengendalian tata ruang dan perlunya pemantaban penyediaan infrastruktur, serta rendahnya ketersediaan air baku, (4) Perlunya penguatan inovasi dan daya saing nilai tambah produksi pada sektor perekonomian, (5) Masih tingginya angka kemiskinan, (6) Meningkatnya ancaman krisis akibat perubahan iklim dan penyakit menular (wabah, epidemi, dan pandemi) dan (7) Perlunya penguatan kemandirian desa.

Dari ketujuh isu strategis tersebut yang terkait dengan tugas dan fungsi Kecamatan adalah isu strategis pertama yaitu **“Perlunya Penguatan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan”**

Rumusan isu strategis Renstra Kecamatan Sumber Kabupaten Rembang Tahun 2021-2026 adalah sebagai berikut:

1. Perlunya penguatan kebijakan pelayanan
2. Peningkatan profesionalisme SDM pelayanan publik
3. Pemenuhan sarana dan prasarana pelayanan publik
4. Transparansi dan partisipasi publik dalam penyelenggaraan pemerintahan

F. Formulasi isu – isu penting berupa rekomendasi dan catatan yang strategis untuk ditindaklanjuti dalam perumusan program dan kegiatan prioritas tahun yang direncanakan. Rekomendasi dan catatan strategis menilik dari permasalahan, tantangan dan peluang adalah sebagai berikut :

1. Program unggulan digitalisasi birokrasi dan Rembang Smart City dalam rangka terwujudnya tatanan birokrasi yang mampu mendukung peningkatan pelayanan dan kehidupan sosial yang didasari atas prinsip yang transparan, terukur dan akuntabel.
2. Penerapan digitalisasi birokrasi melalui pemanfaatan sistem single Sign On (SSO) dalam rangka mendorong penerapan teknologi informasi dan sistem layanan terintegrasi di Pemerintah Kabupaten Rembang Rembang.

Tabel 2.3.

Pencapaian Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah Kecamatan Sumber Kabupaten Rembang

No	Indikator Tujuan/Sasaran Perangkat Daerah	Target Renstra Perangkat Daerah				Realisasi Capaian		Proyeksi		Catatan Analisis
		Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	
1	2	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	Renstra 2020-2021									
1.	Indek Kepuasan Masyarakat	82				84,28				
2.	Nilai Keterbukaan Informasi Publik	7,25				8,25				
	Renstra 2021-2026									
1.	Indek Pelayanan Publik		3,1	3,2	3,3	Na	3,27	3,30		
2.	Indek Kepuasan Masyarakat		82,5	83	84	84,28	82,17	83,5	84	

2.4. Review terhadap Rancangan Awal RKPD

Tahun 2024 masih dalam tahun pelaksanaan RPJPD Kabupaten Rembang tahun 2005-2025, dan awal tahun pelaksanaan RPJMD 2021-2026. Sehingga dalam penyusunan Dokumen RKPD tahun 2023 berpedoman pada Dokumen RPJPD 2005-2025 dan RPJMD tahun 2021-2026.

Berdasarkan RPJPD Kabupaten Rembang Tahun 2005-2025 dan permasalahan serta isu strategis pembangunan sebagaimana disajikan dalam Bab II, maka pembangunan Kabupaten Rembang Tahun 2024 diarahkan pada Tema “Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia, Perekonomian Daerah, Kualitas Infrastruktur dan Pengelolaan Lingkungan Hidup dengan didukung oleh Tata Kelola Pemerintahan yang Efektif”. Tema ini di realisasikan melalui prioritas RKPD Kabupaten Rembang 2023, dengan refocusing pada program dan kegiatan yang terkait (i) mitigasi dampak kesehatan; (ii) mitigasi dampak ekonomi; (iii) langkah-langkah recovery ekonomi dan sosial sebagai respon pasca bencana Covid-19. Adapun Prioritas RKPD Kabupaten Rembang tahun 2024 sebagai berikut:

1. Pemantapan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan;
2. Peningkatan Kualitas Sumberdaya Manusia yg berdaya saing
3. Percepatan Penurunan Angka Kemiskinan;
4. Peningkatan ketersediaan air baku;
5. Pemantapan pengendalian tata ruang dan infrastruktur;
6. Penguatan inovasi dan daya saing nilai tambah produksi pada sektor perekonomian; dan
7. Penurunan Ancaman Krisis akibat Bencana Alam, Perubahan Iklim dan Penyakit Menular (Wabah, Epidemic, dan Pandemic).

Prioritas Pembangunan RKPD Kabupaten Rembang Tahun 2024 yaitu: **“Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia, Perekonomian Daerah, Kualitas Infrastruktur dan**

Pengelolaan Lingkungan Hidup dengan didukung oleh Tata Kelola Pemerintahan yang Efektif”

Prioritas RKPD tahun 2024 dan keterkaitannya dengan arah kebijakan RPJPD kabupaten Rembang 2005-2025. Penentuan prioritas dan sasaran pembangunan daerah Kabupaten Rembang dalam Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) 2024 harus pula memperhatikan aspek keselarasan dengan Rencana Kerja Pemerintah Pusat maupun Rencana Kerja Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Tengah.

Review terhadap RKPD Kabupaten Rembang sebagaimana dalam lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 memuat tentang perbandingan RKPD dengan hasil analisis kebutuhan Kecamatan Sumber Kabupaten Rembang untuk tahun anggaran 2023. Selain itu review juga berisikan penjelasan mengenai alasan proses tersebut dilakukan dan catatan penting. Pagu indikatif dalam Rencana Kerja Kecamatan Sumber diisi berdasarkan berdasarkan matrik indikasi rencana program dan pendanaan Bab VII RPJMD Kabupaten Rembang Tahun 2021-2026. Rincian review dimuat berdasarkan format tabel T-C.29 Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 sebagai berikut :

Tabel 2.4.

Review Terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2024
Kabupaten Rembang

Nama Perangkat Daerah: Kecamatan Sumber

Kode					Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
					Urusan/Bidang Urusan/Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Urusan/Bidang Urusan/Program/Kegiatan /Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana	
1					2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
7					UNSUR KEWILAYAHAN					UNSUR KEWILAYAHAN					
7	01				KECAMATAN SUMBER				3.669.870.000	KECAMATAN SUMBER				3.669.870.000	
7	01	01			KECAMATAN SUMBER				3.669.870.000	KECAMATAN SUMBER				3.669.870.000	
7	01	01	2.01		Unsur Kewilayahan					Unsur Kewilayahan					
7	01	01	2.01	01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Kec. Sumber	Nilai Sakip OPD	66	2.949.870.000	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Kec. Sumber	Nilai Sakip OPD	66	2.949.870.000	
7	01	01	2.01	02	Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kec. Sumber	%Keselarasan Perencanaan terhadap capaian Kinerja Perangkat Daerah	70%	41.000.000	Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kec. Sumber	%Keselarasan Perencanaan terhadap capaian Kinerja Perangkat Daerah	70%	41.000.000	
7	01	01	2.01	07	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Kec. Sumber	%Dokumen Pelaporan Keuangan dengan kualitas baik	90%	2.028.000.000	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Kec. Sumber	%Dokumen Pelaporan Keuangan dengan kualitas baik	90%	2.028.000.000	
7	01	01	2.02		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Kec. Sumber	%Dokumen Kepegawaian yang di kelola dengan baik	95%	12.000.000	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Kec. Sumber	%Dokumen Kepegawaian yang di kelola dengan baik	95%	12.000.000	
7	01	01	2.02	01	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Kec. Sumber	%Pemenuhan Pelayanan Umum	100%	112.600.000	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Kec. Sumber	%Pemenuhan Pelayanan Umum	100%	112.600.000	
7	01	01	2.02	03	Pengadaan Barang Milik Daerah	Kec.	%Ketercukupan Sarana	95%	432.030.000	Pengadaan Barang Milik Daerah	Kec.	%Ketercukupan Sarana	95%	432.030.000	

					Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Sumber	dan Prasarana Aparatur			Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Sumber	dan Prasarana Aparatur			
7	01	01	2.02	05	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kec. Sumber	%Pemenuhan Pelayanan Administrasi Perkantoran	100%	94.240.000	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kec. Sumber	%Pemenuhan Pelayanan Administrasi Perkantoran	100%	94.240.000	
7	01	01	2.05		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Kec. Sumber	%Pemenuhan Pelayanan Administrasi Perkantoran	80%	230.000.000	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Kec. Sumber	%Pemenuhan Pelayanan Administrasi Perkantoran	80%	230.000.000	
7	01	01	2.05	03	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Kec. Sumber	Capaian Urusan Pemerintahan yang di limpahkan ke Camat	90%	170.000.000	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Kec. Sumber	Capaian Urusan Pemerintahan yang di limpahkan ke Camat	90%	170.000.000	
7	01	01	2.05	05	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan pemerintahan di tk kecamatan	Kec. Sumber	%Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	100%	20.000.000	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan pemerintahan di tk kecamatan	Kec. Sumber	%Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	100%	20.000.000	
7	1	01	2.06		Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan	Kec. Sumber	%Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	100%	50.000.000	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan	Kec. Sumber	%Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	100%	50.000.000	
7	1	01	2.06	01	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang dilimpahkan kepada Camat	Kec. Sumber	%Penyelenggaraan Penunjang Kesejahteraan Masyarakat yang ditangani	85%	100.000.000	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang dilimpahkan kepada Camat	Kec. Sumber	%Penyelenggaraan Penunjang Kesejahteraan Masyarakat yang ditangani	85%	100.000.000	
7	1	01	2.06	03	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Kec. Sumber	%Kontribusi Dana Desa Untuk Pemberdayaan Masyarakat Jumlah Desa dengan Swadaya Rp.20.000.000,- 5 Desa	100%	205.000.000	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Kec. Sumber	%Kontribusi Dana Desa Untuk Pemberdayaan Masyarakat Jumlah Desa dengan Swadaya Rp.20.000.000,- 5 Desa	100%	205.000.000	
7	1	01	2.06	04		Kec. Sumber					Kec. Sumber				
7	1	01	2.06	05	Fasilitasi ,Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintah Desa	Kec. Sumber	Rata Rata IKM Desa	65 angka	205.000.000	Fasilitasi ,Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintah Desa	Kec. Sumber	Rata Rata IKM Desa	65 angka	205.000.000	

7	1	01	2.06	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang Undangan	Kec. Sumber		12	3.600.000	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang Undangan	Kec. Sumber		12	3.600.000	
7	1	01	2.06	07	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Kec. Sumber	Cakupan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	100%	50.000.000	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Kec. Sumber	Cakupan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	100%	50.000.000	
7	1	01	2.06	09	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	Kec. Sumber	% Pemenuhan penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	100%	50.000.000	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	Kec. Sumber	% Pemenuhan penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	100%	50.000.000	
7	1	01	2.07		PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Kec. Sumber	%Kontribusi Dana Desa/Kelurahann untuk Pemberdayaan Masyarakat	20 %	180..000.000	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Kec. Sumber	%Kontribusi Dana Desa/Kelurahann untuk Pemberdayaan Masyarakat	20 %	180..000.000	
7	01	01	2.07	01	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Kec. Sumber	%Pelaksanaan Pembangunan secara swakelola %Penetapan APBDesa dan Penyampaian SPJ tepat waktu	100%	180.000.000	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Kec. Sumber	%Pelaksanaan Pembangunan secara swakelola %Penetapan APBDesa dan Penyampaian SPJ tepat waktu	100%	180.000.000	
7	1	01	2.07	05	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Kec. Sumber	Cakupan Penyelenggaraan Urusan Ketentraman dan Ketertiban Umum	7 nilai	115.000.000	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Kec. Sumber	Cakupan Penyelenggaraan Urusan Ketentraman dan Ketertiban Umum	7 nilai	115.000.000	
7	1	01	2.07	06	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Kec. Sumber	% Penyelesaian permasalahan Ketentaraman dan Ketertiban umum	100%	85.000.000	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Kec. Sumber	% Penyelesaian permasalahan Ketentaraman dan Ketertiban umum	100%	85.000.000	
7	1	01	2.07	09	Koordinasi Penerapan dan Pengakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	Kec. Sumber	% Penyelesaian permasalahan Ketentaraman dan Ketertiban umum	100%	30.000.000	Koordinasi Penerapan dan Pengakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	Kec. Sumber	% Penyelesaian permasalahan Ketentaraman dan Ketertiban umum	100%	30.000.000	

Rembang tahun 2024 telah menggambarkan kebutuhan pendanaan program dan kegiatan Kantor Kecamatan Sumber pada tahun 2024. Meskipun demikian, pada tahap perencanaan selanjutnya dapat terjadi dinamika perubahan program dan kegiatan karena adanya penyesuaian terhadap kebijakan atau regulasi yang baru yaitu Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 90 tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah, atau terdapat penyesuaian pada saat pembahasan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) pada sisi legislatif, di mana program dan kegiatan perlu mengakomodir aspirasi dari masyarakat.

2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Kecamatan Sumber Kabupaten Rembang akan menampung Usulan Program dan Kegiatan yang di usulkan para pemangku kepentingan, baik dari kelompok masyarakat terkait langsung dengan pelayanan, LSM, asosiasi-asosiasi maupun dari unsur masyarakat lainnya yang langsung ditujukan kepada Perangkat Daerah maupun berdasarkan hasil pelaksanaan Musrenbangcam.

Tabel 2.5

**Usulan Program dan Kegiatan dari Para Pemangku Kepentingan Tahun 2024
Pemerintah Kabupaten Rembang**

No	Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Besaran/ volume	Catatan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
I	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Kec.Sumber	Nilai SAKIP OPD	1 Paket	100.000.000
1	Pemeliharaan barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Kec.Sumber	%Barang Milik Daerah dengan kondisi baik	1 Paket	100.000.000
	Pemeliharaan /Rehabilitasi Gedung kantor dan Bangunan Lainnya	Kec Sumber	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yg dipelihara /direhabilitasi	100.000.000	Rehabilitasi Lantai Gedung Kantor Kecamatan
II	Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum	Kec.Sumber	Cakupan Penyelenggaraa n Urusan Ketentraman dan Ketertiban Umum	50.000.000	

1	Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	Kec.Sumber	% Penyelesaian Permasalahan Ketentraman dan Ketertiban Umum	50.000.000	
	Koordinasi /Sinergi dgn Perangkat Daerah yang tugas dan fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	Kec.Sumber	Terlaksananya Koordinasi /Sinergi dengan Perangkat Daerah yang tugas dan fungsinya di bidang Penegakan Peraturan Perundang Undangan dana tau Kepolisian Negara Republik Indionesia	50.000.000	Pembinaan Linmas/Han sip Desa
	JUMLAH			150.000.000	

BAB III

TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

3.1 Telaah Kebijakan Nasional dan Provinsi Jawa Tengah

Prioritas Pembangunan Tahun 2024 mengacu pada Arah kebijakan pembangunan nasional yang merupakan pedoman untuk merumuskan prioritas dan sasaran pembangunan nasional serta rencana program dan kegiatan pembangunan daerah yang dilakukan melalui pendekatan politik, teknokratik, partisipatif, bottom up dan top down, holistik-tematik, integratif, dan spasial. Keberhasilan pembangunan nasional adalah keberhasilan dari pencapaian semua sasaran dan prioritas serta program dan kegiatan pembangunan daerah yang ditetapkan dalam RKPD dan dilaksanakan secara nyata oleh semua pemangku kepentingan. Oleh karena itu perencanaan pembangunan daerah Kabupaten Rembang Tahun 2024 disusun dengan berpedoman pada prioritas pembangunan nasional dan provinsi Jawa Tengah Tahun 2024.

3.2 Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah

A. Tujuan

Tujuan dari penyusunan Renja merupakan suatu aspek yang dapat menggambarkan program yang diinginkan, mempunyai arah yang jelas bagi organisasi tetapi belum menggambarkan ukuran-ukurannya serta mempunyai karakteristik menantang tetapi realistis. Adapun tujuan yang ditetapkan berdasarkan analisis dari faktor-faktor yang ada adalah :

1. Meningkatkan kualitas penyelenggaraan pelayanan pemerintahan Kecamatan.

Tujuan tersebut selaras dengan tujuan yang melekat dalam misi pertama RJPMD Kabupaten Rembang Tahun 2016-2025 yaitu mewujudkan good governance.

Tujuan sebagaimana tersebut berkaitan dengan tugas pokok dan fungsi Kecamatan Sumber seperti yang tertuang dalam Peraturan Bupati Rembang Nomor **Nomor 6 Tahun 2021** tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Kecamatan.

B. Sasaran

Adapun untuk mencapai tujuan tersebut Kecamatan Sumber Kabupaten Rembang menetapkan sasaran jangka menengah yang akan dicapai.

Dalam rangka pencapaian tujuan Kecamatan Sumber selama tahun 2021-2026, dijabarkan sebagai berikut:

1. Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik Kecamatan Sumber.
2. Meningkatnya Kualitas Pelayanan Kecamatan Sumber.

Tabel 3.1

Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Perangkat Daerah Kecamatan Sumber
Kabupaten Rembang Tahun 2021-2026

NO	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR TUJUAN/ SASARAN	SATUAN	KONDISI AWAL		TARGET KINERJA TUJUAN/SASARAN PADA TAHUN KE-				
					2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik Kecamatan Sumber	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Kecamatan	Indeks Pelayanan Publik (IPP)	Angka	Na	Na	3,1	3,2	3,3	3,4	3,5
			Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	Angka	84,28	84,28	82,5	83	84	85	86

3.3 Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan

Program merupakan sekumpulan kegiatan yang sistematis dan terpadu untuk mendapatkan hasil yang dilaksanakan oleh satu dan beberapa instansi pemerintah ataupun dalam rangka kerjasama dengan masyarakat guna mencapai sasaran tertentu.

Sejalan dengan Rencana Strategis Kantor Kecamatan Sumber Tahun 2021-2026 serta RPJMD Kabupaten Rembang Tahun 2021-2026, maka uraian program dan kegiatan Kantor Kecamatan Sumber tahun 2024 terdiri dari sebagai berikut.

- A. Uraian garis besar mengenai rekapitulasi program dan kegiatan, antara lain meliputi :

Jumlah program dan jumlah kegiatan untuk Rencana Kerja Kantor Kecamatan Sumber adalah sejumlah *6 Program* dan *16 Kegiatan*. Sifat penyebaran lokasi program dan kegiatan yaitu secara teknis hampir merata di wilayah Kecamatan Sumber Kabupaten Rembang. Beberapa program apabila dilihat persebarannya merupakan program dengan lingkup Kabupaten seperti Program Perencanaan Pembangunan, Program Pengendalian dan Evaluasi Perencanaan Pembangunan. Akan tetapi untuk beberapa program dan kegiatan menysasar pada suatu kelompok masyarakat tertentu seperti kegiatan koordinasi program penanggulangan kemiskinan yang menysasar pada kelompok masyarakat miskin, fasilitasi kerjasama dengan dunia usaha/Lembaga yang menysasar pada kelompok usaha serta beberapa program dan kegiatan dengan sasaran kelompok masyarakat tertentu.

BAB IV

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN KECAMATAN SUMBER TAHUN 2024

Dalam rangka mencapai sasaran maka dilaksanakan melalui Program dan Kegiatan yang ditunjang dengan pendanaan / anggaran yang besarnya disesuaikan dengan jenis dan dampak kegiatan kepada kesejahteraan masyarakat serta kemampuan APBD Kabupaten Rembang Tahun Anggaran 2024, untuk mendanai :

1. Program Penunjang Urusan pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota

Program ini memiliki indikator **Nilai SAKIP OPD** dengan kegiatan dan sub kegiatan sebagai berikut :

- **Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**
 - a. Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
 - b. Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
 - c. Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA OPD
- **Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**
 - a. Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
 - b. Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan OPD
 - c. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun OPD
- **Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**
 - a. Pendataan dan pengolahan administrasi kepegawaian
 - b. Monitoring Evaluasi dan Penilaian Kinerja Pegawai
- **Administrasi Umum Perangkat Daerah**
 - a. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
 - b. Penyediaan Peralatan Rumah Tangga
 - c. Penyediaan Bahan Logistik Kantor
 - d. Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan
 - e. Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang undangan
 - f. Penyediaan Bahan / Materila
 - g. Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi OPD
- **Pengadaan Barang Milik daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**
 - a. Pengadaan kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan
 - b. Pengadaan Mebel
 - c. Pengadaan Peralatan dan Mesin lainnya

- d. Pengadaan Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya
- e. Pengadaan sarana dan prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya

- **Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**
 - a. Penyediaan Jasa Surat Menyurat
 - b. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
 - c. Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
- **Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**
 - a. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan
 - b. Pemeliharaan Peralatan dan Mesin
 - c. Pemeliharaan / Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya

2. Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik

Program ini memiliki indikator ***Capaian Urusan Pemerintahan yang dilimpahkan ke Camat*** dengan kegiatan dan sub kegiatan sebagai berikut:

- **Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan**
 - a. Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan Kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan
- **Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tk Kecamatan**
 - a. Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan
- **Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang dilimpahkan Kepada Camat**
 - a. Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan kewenangan lain yang dilimpahkan

3. Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan

Program ini memiliki indikator ***% Kontribusi Dana Desa/Kelurahan untuk Pemberdayaan Masyarakat*** dengan kegiatan dan sub kegiatan sebagai berikut:

- **Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa**
 - a. Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa
 - b. Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan

4. Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum

Program ini memiliki indikator ***Cakupan Penyelenggaraan Urusan Ketentraman dan Ketertiban Umum*** dengan kegiatan dan sub kegiatan sebagai berikut:

- **Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum**
 - a. Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan
- **Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah**
 - b. Koordinasi /Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang undangan dan /atau Kepolisian Negara RI

5. Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa

Program ini memiliki indikator ***% Desa dengan Tata Kelola Pemerintahan Baik*** dengan kegiatan dan sub kegiatan sebagai berikut:

- **Fasilitasi Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa**
 - a. Fasilitasi Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa
 - b. Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa
 - c. Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa
 - d. Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa
 - e. Fasilitasi Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa
 - f. Rekomendasi Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa
 - g. Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Partisipatif
- **Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum**

Program ini memiliki indikator Cakupan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umumn dengan kegiatan dan sub kegiatan sebagai berikut:

 - Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah
 - a. Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila Pelaksanaan Undang undang Dasar Negara RI Tahun 1945,Pelestarian Bhineka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia

Jumlah program dan kegiatan untuk Rencana Kerja Kecamatan Sumber Kabupaten Rembang Tahun 2024 adalah sejumlah **6 program** yang masuk dalam urusan umum serta **15 kegiatan** dan **41 sub kegiatan**. Kebutuhan dana/pagu indikatif yang dirinci menurut sumber Pendanaannya yaitu berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Rembang Tahun Anggaran 2024 adalah sebesar Rp. **3.669.870.000** Rincian rencana kerja dan pendanaan Kecamatan Sumber Kabupaten Rembang sebagaimana tertera dalam **tabel 4.1** sebagai berikut:

Tabel 4.1.
Rumusan Rencana Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Perangkat Daerah Tahun 2024
dan Prakiraan Maju Tahun 2025

Nama Perangkat Daerah: Kecamatan Sumber

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Rencana Tahun 2024			Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025	
								Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif
(1)					(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
7					UNSUR KEWILAYAHAN								
7	01				KECAMATAN				3.669.870.000				3.852.740.000
7	01	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai SAKIP OPD	Kec.Sumber	66	2.949.870.000			66	2.922.740.000
7	01	01	2.01		Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Prosentase Keselarasan Perencanaan terhadap Capaian Kinerja Perangkat Daerah	Kec.Sumber	70	41.000.000			70	56.000.000
7	01	01	2.01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Kec.Sumber	2	15.000.000	PAD		2	25.000.000
7	01	01	2.01	02	Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Kec Sumber	2	6.000.000	PAD		2	6.000.000

7	01	01	2.01	07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kec.Sumber	7	20.000.000	PAD		2	20.000.000
7	01	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Prosentase Dokumen Pelaporan Keuangan dengan kualitas baik	Kec.Sumber	90	2.028.000.000			100	2.085.000.000
7	01	01	2.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Kec.Sumber	19	1.950.000.000	PAD		19	2.000.000.000
7	01	01	2.02	03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Kec.Sumber	2	73.000.000	PAD		2	73.000.000
7	01	01	2.02	05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Kec.Sumber	2	5.000.000	PAD		1	5.000.000
7	01	01	2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Prosentase Dokumen Kepegawaian yang dikelola dengan baik	Kec.Sumber	95	12.000.000			100	14.000.000
7	01	01	2.05	03	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Kec.Sumber	3	6.000.000	PAD		3	6.000.000
7	01	01	2.05	05	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Kec.Sumber	19	6.000.000	PAD		19	8.000.000
7	1	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Prosentase Pemenuhan Pelayanan Umum	Kec.Sumber	100	112.600.000			100	113.000.000
7	1	01	2.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Kec.Sumber	12	8.000.000	PAD		12	8.000.000
7	1	01	2.06	03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Kec.Sumber	12	8.000.000	PAD		12	8.000.000
7	1	01	2.06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Kec.Sumber	12	30.000.000	PAD		12	30.000.000

7	1	01	2.06	05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	Kec.Sumber	12	8.000.000	PAD		12	8.000.000
7	1	01	2.06	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang Undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	Kec Sumber	12	3.600.000	PAD		12	3.600.000
7	1	01	2.06	07	Penyediaan Bahan/Material	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	Kec.Sumber	12	20.000.000	PAD		12	20.000.000
7	1	01	2.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kec.Sumber	12	35.000.000	PAD		12	35.000.000
7	1	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Prosentase Ketercakupan Sarana Prasarana Aparatur	Kec.Sumber	95	432.030.000			95	450.000.000
7	01	01	2.07	01	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan	Kec Sumber	1	25.000.000	PAD		1	30.000.000
7	1	01	2.07	05	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	Kec.Sumber	14	50.000.000	PAD		14	30.000.000
7	1	01	2.07	06	Pengadaan Peralatan dan Mesin	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Kec Sumber	6	42.030.000	PAD		6	50.000.000
7	1	01	2.07	09	Pengadaan Gedung Kantor atau bangunan lainnya	Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Kec Sumber	2	300.000.000	PAD		2	300.000.000
7	1	01	2.07	11	Pengadaan sarana dan prasarana pendukung Gedung kantor atau bangunan lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Kec.Sumber	3	15.000.000	PAD		3	15.000.000
7	1	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Prosentase Pemenuhan Pelayanan Administrasi Perkantoran	Kec.Sumber	100	94.240.000			100	94.240.000
7	1	01	2.07	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat	Kec.Sumber	12	1.000.000	PAD		12	1.000.000

						Menyurat							
7	1	01	2.07	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Kec.Sumber	12	18.000.000	PAD		12	18.000.000
7	1	01	2.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Kec.Sumber	12	75.240.000	PAD		12	75.240.000
7	1	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Prosentase BMD dengan Kondisi Baik	Kec.Sumber	80	230.000.000			80	110.000.000
7	1	01	2.09	01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	Kec.Sumber	12	20.000.000	PAD		12	20.000.000
7	1	01	2.09	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Kec Sumber	14	10.000.000	PAD		14	20.000.000
7	1	01	2.09	09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Kec.Sumber	1	200.000.000	PAD		1	200.000.000
7	1	02			PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Capaian urusan pemerintahan yang dilimpahkan ke camat	Kec.Sumber	90	170.000.000			90	170.000.000
7	01	02	2.10		Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan pemerintahan di tk kecamatan	Prosentase Penyelenggaraan kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Kec Sumber	100	20.000.000			100	20.000.000
7	01	02	2.10	02	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tk Kecamatan	Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Kec Sumber	1	20.000.000	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL		1	20.000.000
7	01	02	2.02		Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak	Prosentase Penyelenggaraan Kegiatan	Kec.Sumber	100	50.000.000			100	60.000.000

					dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan	Pemerintahan di Tingkat Kecamatan							
7	01	02	2.02	03	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Kec.Sumber	1	50.000.000	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL		100	50.000.000
7	01	02	2.04		Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	Prosentase Pemerintahan Desa yang lunas bayar PBB	Kec.Sumber	85	100.000.000			85	100.000.000
7	01	02	2.04	01	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Kec.Sumber	1	30.000.000	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL		1	30.000.000
7	01	03			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Prosentase Kontribusi dana desa/kelurahan untuk pemberdayaan masyarakat Jumlah Desa dengan swadaya masyarakat>_Rp 20 juta	Kec.Sumber		180.000.000				300.000.000
7	01	03	2.01		Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Prosentase Penyelenggaraan penunjang kesejahteraan masyarakat yang ditangani	Kec.Sumber	100	180.000.000			100	300.000.000
7	01	03	2.01	01	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Kec.Sumber	1	60.000.000	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL		1	70.000.000
7	01	03	2.01	03	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Kec.Sumber	1	120.000.000	DANA TRANSFER UMUM-DANA		1	230.000.000

										BAGI HASIL			
7	01	04			PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Cakupan Penyelenggaraan Urusan Ketentraman dan Ketertiban Umum	Kec.Sumber		115.000.000				120.000.000
7	01	04	2.02		Koordinasi penerapan dan penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	Prosentase Penyelesaian Permasalahan Ketentraman dan Ketertiban Umum	Kec.Sumber	100	115.000.000			100	120.000.000
7	01	03	2.06	01	Koordinasi /Sinergi dengan Perangkat daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang undangan dan /atau Kepolisian Negara RI	Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Kec.Sumber	1	30.000.000			1	35.000.000
7	01	04	7.03		Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum	Prosentase Penyelesaian Permasalahan Ketentraman dan Ketertiban Umum	Kec Sumber	100	85.000.000			100	85.000.000
7	01	04	7.03	01	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Kec Sumber	12	85.000.000	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL		12	85.000.000
7	01	05			PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Cakupan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	Kec Sumber	100	50.000.000				50.000.000
7	01	05	2.01		Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	Jumlah Fasilitas Pembinaan Wawasan Kebangsaan	Kec.Sumber	1	50.000.000			1	50.000.000
7	01	05	2.01	01	Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka memantapkan Pengamalan Pancasila ,Pelaksanaan Undang	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-	Kec Sumber	100	70.000.000	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL		1	70.000.000

					Undang Dasar Negara RI Tahun 1945, Pelestarian Bhineka Tunggal Ika serta Pemertahanan Keutuhan Negara Kesatuan RI	Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia							
7	01	06			PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Prosentase Desa dengan Tata Kelola Pemerintahan baik	Kec.Sumber	100	205.000.000			1	240.000.000
7	01	06	2.01		Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Rata rata IKM Desa	Kec.Sumber	100	205.000.000			1	240.000.000
7	01	06	2.01	01	Fasilitasi Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa	Kec.Sumber	1	15.000.000	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL		1	20.000.000
7	01	06	2.01	02	Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa	Kec Sumber	1	15.000.000	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL		1	20.000.000
7	01	06	2.01	03	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	Kec.Sumber	1	60.000.000	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL		1	65.000.000
7	01	06	2.01	05	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa	Kec.Sumber	1	15.000.000	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL		1	20.000.000

7	01	06	2.01	06	Fasilitasi Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa	Kec.Sumber	1	40.000.000	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL		1	45.000.000
7	01	06	2.01	08	Rekomendasi Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa	Jumlah Dokumen Rekomendasi Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa	Kec Sumber	1	30.000.000	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL		1	35.000.000
7	01	06	2.01	13	Fasilitasi Penyusunan Pelaksanaan Pembangunan Partisiopatif	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Perencanaan Pembangunan Partisipatif	Kec.Sumber	1	30.000.000	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL		1	30.000.000

BAB V

PENUTUP

Rancangan Awal Rencana Kerja (RENJA) Kecamatan Sumber Tahun 2024 ini merupakan Rencana Kerja Tahunan berdasarkan Renstra Kecamatan Sumber 2021-2026 dalam menunjang tercapainya Visi, Misi, Kabupaten Rembang serta target dan sasaran pembangunan yang dioperasionalkan melalui Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Rembang Tahun 2024.

Rancangan Awal Rencana Kerja Kecamatan Sumber sebagai bahan dalam penyusunan usulan rencana kegiatan fasilitasi pembangunan yang bersumber dari anggaran APBD Tahun Anggaran 2024 dan untuk mengevaluasi pelaksanaan Rencana Kerja tahun lalu.

Dengan adanya Rancangan awal Rencana Kerja Kecamatan Sumber Tahun 2024, maka penetapan prioritas pembangunan yang merupakan upaya penjabaran dari Visi dan Misi Kecamatan Sumber diharapkan akan lebih terkoordinasi, terintegrasi dan sinergis serta berkelanjutan, dengan sesama OPD di Lingkup Pemerintah Kabupaten Rembang maupun dengan OPD yang membidangi fungsi lain.

1. Catatan penting yang harus mendapat perhatian.

Hal penting dalam pencapaian target program dan kegiatan yang telah direncanakan masih menghadapi permasalahan/kendala, diantaranya:

- a. Ketersediaan anggaran yang tidak sesuai dengan kebutuhan
- b. Masih adanya sarana dan prasarana yang kurang menunjang kelancaran pelaksanaan tugas.

2. Kaidah-kaidah Pelaksanaan

Agar pelaksanaan Renja Kecamatan Sumber tahun 2024 tepat waktu dan sasaran, maka perlu ditetapkan kaidah-kaidah pelaksanaannya sebagai berikut :

- a. Rencana kerja OPD memuat program dan kegiatan OPD serta pagu pendanaannya yang merupakan penjabaran dari RKPD Kabupaten Rembang tahun 2024 dalam rangka mensinergikan, mensinkronisasikan dan mengintegrasikan program dan kegiatan Pemerintah Kabupaten Rembang;

- b. OPD berkewajiban untuk melaksanakan program-program Renja Tahun 2024 dengan sebaik-baiknya.
- c. Sebagai pedoman/ acuan penyusunan Rencana Kerja Anggaran OPD.

3. Rencana Tindak Lanjut

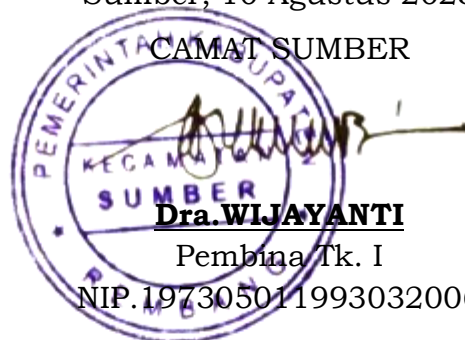
Untuk mencapai tujuan dan sasaran pada Kecamatan Sumber merencanakan beberapa tindak lanjut sebagai berikut :

- a. Agar segala program dan kegiatan yang sudah dinilai berhasil dalam pencapaian kinerja untuk selalu dipertahankan dan selalu ditingkatkan. Karena Kecamatan merupakan satuan kerja perangkat daerah Kabupaten Rembang merupakan organisasi publik tugasnya memberikan pelayanan kepada masyarakat yang mana kualitas pelayanan harus diutamakan kaitannya dengan masyarakat;
- b. Meningkatkan sarana prasarana guna menunjang kelancaran pelaksanaan tugas di Kecamatan Sumber;
- c. Terpenuhinya ketersediaan anggaran sesuai kebutuhan;
- c. Meningkatkan koordinasi dan komunikasi dengan pihak terkait guna menciptakan kondusifitas wilayah.

Demikian Rancangan Awal Rencana Kerja (Renja) OPD Kecamatan Sumber Kabupaten Rembang Tahun 2024 dapat bermanfaat bagi semua pihak khususnya pada Kecamatan Sumber dan dapat sebagai acuan dalam pembuatan dan penyusunan Rencana Kegiatan Anggaran (RKA) OPD Tahun 2024.

Sumber, 10 Agustus 2023

CAMAT SUMBER



Dra. WIJAYANTI

Pembina Tk. I

NIP.197305011993032006

